

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR: 125 /KPTS/SEK. DPRD/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 73/JPTS/SEK. DPRD/2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2022.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Menimbang

- berdasarkan Keputusan Bupati : a. bahwa 821.23/1450/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Setingkat Jabatan Struktural Esalon III di Lingkungan Pemerintah Wajo menetapkan Daerah Kabupaten Sdr Dr. H. ALIAS. S.Sos. SH, MH selaku Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Legislasi dan Kabupaten Wajo;
 - b. bahwa Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab I huruf G angka 12 dan Angka 13, sehingga keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Nomor 73 Tahun 2022 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rakyat Sekretaris Dewan Perwakilan Kabupaten Wajo tentang Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Wajo Nomor 73/KPTS/SEK.DPRD/2022 Kabupaten tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemgganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan dan Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Prekonomian Nasilnal dan/atau Stabiltas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Susunan Daerah (Lembaran Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun Nomor 11);
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 184);

- Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo tahun 2022;
 - 2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Bagian Legislasi dan Persdiangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo Nomor: 821.2/437/BKPSDM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor 73/KPTS/SEK.DPRD/2022 tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022.

PERTAMA

: Menunjuk Pegawai Negesi Sipil yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

- : Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab Kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo dan melaksanakan tugas, meliputi :
 - mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

: Penyelenggaraan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI SENGKANG
PADA TANGGAL : JUNI 2022
VSEKRETARIS DPRD KABUPATEN WAJO

Drs. SAINAL HAYAT. M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda I, IV/c

Nip. 19670101 199603 1 007

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bupati Wajo, di Sengkang;

- 2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
- 3. Inspektur Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo
- 5. Arsip

H. Reporta Administrasi 2. Penyednagaran Administrasi Keningan ASN 2. Penyednagaran Administrasi Keningan ASN 3. Penyusunan Dokumen Perangka 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penden Asi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penden Asi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penden Asi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kenangan Pengelenganan Asi Penyusunan Laporan Kenangan Pengelenganan Asi Penyusunan Laporan Kenangan Pengelenganan Asia Penyusunan Laporan Kenangan Pengelenganan Asia Pengelengan Asia Pengelengan Asia Pengelengan Asia Pengelengan Pengelengan Asia Pengelengan Pengel
Republishment Administrat Perpendium Galp Art Tenjangan ANN 25 25 25 25 25 25 25
Republication Administrat Republication Administration American Manager Administration American Man
Republication Administred Proposition Continued No.
Repola Bigar Administrate Procedum California (1982) Procedum Califo
Republished Alministers Percentage Per
Keyels lingara Adaministrees Procedum Gui (Jan Tunjangara ASN 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Republishment Republishment Recomment Recommen
1. Propodana Ginji dan Tujuingari ASN 2. Propodana Ginji dan G
Freyedulani
Freyendram Guij, dan Tujajmagan ASN 2. Percyclana Guij, dan Tujajmagan ASN 2. Percyclana Guij, dan Tujajmagan ASN 2. Percyclana Guij, dan Tujajmagan ASN 3.078/rds 286 5.078/rds 2
Expedit Repair Administred Petrycolaum Gaji (Iun Tanjangam ASN 3.078-876.2366 Schwidteriolaum Petrycolaum Gaji (Iun Tanjangam ASN 3.078-876.2366 Schwidteriolaum Petrycolaum Administred Petrycolaum Capama Petrycolaum Pe
Kepsha Bagan Administed
Kepala Bagam Administral Automotion Au
Republing Administred 1. Penyselama Gaji dari Tunjangan ASN 2. September 3. September
Republ Bagan Administred 1. Percyclama Gail dur Tuajangan ASN 2. Section (April 1982) 2. Section (April 1982) 3. Section (April 1982) 4. Koedican (April 1982) 4. Koedica
Kepada Bagana Administrasi
Kepada Bagan Administrast 1. Penyedanan Gaji dan Tanjangan ASN 2. Penyedanan Gaji dan Tanjangan ASN 2. Penyedanan Gaji dan Tanjangan ASN 2. Penyedanan Gaji dan Tanjangan Debah 2. Penyedanan Administrast Kanangan Debah 2. Penyedanan Debah 2. Penyedanan Administrast Kanangan Penyakan Debah 2. Penyedanan Administrast Kanangan Penyakan Debah 2. Penyedanan Behar 2. Penyedanan Debah 2. Penyedanan
Kepada Bagam Administrasi
Kepskii Bigam Administrasis L. Penyedengaman (Aministrasis L
Reproduction Administrast L. Penyeduann (Sigii dan Uningangan ASN) Administrast L. Penyeduann (Sigii dan Uningangan ASN) S. 287-63.296 Penyeduagaman (Administrast Keungan I)PRD 16.574.551.571 Penyeduannan (Debugan Debugan Pengeluannan Pengelan I)PRD 16.574.551.571 Penyeduannan (Debugan I)PRD 16.574.551.571 Penyeduan I)PRD
Repsylla Blagam Administrasi
Report Administrast Pencyclana Gaji dan Tunjangan ASN S.
Administrasi
A. Penyedian Administrasi
Penyediana Giji dari Tanjangan ASN Acestra Geleng Kantor atau Bangunan Limnya Acestra Geleng Kantor atau Bangunan Kantor Acestra Geleng Kantor atau
Repola Edgum Administrast
Repsth Bagsan Administrasi
Repsida Bagara Administrasi
Repyth Bagian Administrasi
Reputa Administrasi
Petrycelaam Gaji dan Tunjangan ASN 2 Petrycelaam Gaji dan Tunjangan ASN 3.078.763.296 Petrycelaam Gaji dan Tunjangan ASN 3.078.763.296 Petrycelaam Gaji dan Tunjangan Administrasi Kanangan DPRD 16.574.581.571 Petrycelaam Lokumen Petryanam Dokumen RKA-SKPD 16.574.581.571 Petryusanam Dokumen RKA-SKPD 5.674.300 Koordinasi dan Penyusanam Laporan Kerangan Dekumen RKA-SKPD 3.070.800 Koordinasi dan Penyusanam Laporan Kerangan Akhir Tahun SKPD 3.070.800 Koordinasi dan Penyusanam Laporan Kendaran Penterikasan 10.026.800 Koordinasi dan Penyusanam Laporan Kendaran Penterikasan 10.026.800 Petrycelaan Jasa Pentelhuran Penterikasan 10.026.800 1.499.100 Penyediaan Jasa Pentelhuran Jasa Pentelhuran Jasa Pentelhuran Jasa Pentelhuran Jasa Pentelhuran Dinas Jasa Pentelhuran Pajak Kerdaran Derostatasi SKPD 1.307.798 Pentelhuran Pajak Pertanan Kerdaran Dinas Derostatasi SkPD 1.307.998 Pentelhuran Pajak Pertanan Gedung Kentor atau Bangunan Lainnya 1.429.400 1.429.400 Penyediaan Jasa Pentelhuran dan Pencaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.429.400 1.429
A. Kepsda Bagian Administrasi A. Penyeduan Gaji dari Tunjangan ASN 3.078.763.296
Keyska Hagaan Administrasi
Repail Begun Administrasi
Kepstal Bagian Administrasi
Kepsida Bagian Administrasi 1. Pemyediaan Gaji dari Tunjangan ASN 3.078.763.296 Kepsida Bagian Administrasi 1. Pemyediaan Gaji dari Tunjangan ASN 3.078.763.296 2. Pemyediagaraan Administrasi Keuangan Dekumen Perangkat Daerah 16.574.551.571 3. Pemyediaan In Pemyusanan Dokumen Perangkat Daerah 16.574.551.571 4. Keschrehriatan Pempusanan Dokumen RKA-SKPD 16.574.300 5. Koordinasi dan Pemyusanan Dokumen Pempusanan Dokumen Pempusanan Capatan Kinerja dan Pempusanan Capatan Kinerja dan Pempusanan Capatan Kinerja dan Pempusanan Capatan Kinerja dan Repembaran Kentangan Akhir Tahun SKPD 1. Pemyediaan Jasa Pemeliharan Pempusanan Capatan Kendaruan Pempusanan Capatan Kendaruan Dinas Kendaruan Dinas Capatan Sasa Pemeliharan Pajak Kendaruan Perorangan Disas sidu Kendaruan Dinas Daga Pempusan Capatan Kinerja dan Perasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lapangan Disas sidu Kendaruan Dinas Gedung Kantor atau Bangunan Lapangan Disas Sasa Lapangan Disas Capatanan Capatan Kendaruan Dinas Operasional atau Lapangan Disas Sasa Disas Sasa Disas Di
Kepsda Bagun Administrasi
Kepsala Bagian Administrasi
Kepwila Bagian Administrasi 1. Pemyediaam Gaji dan Tunjangan ASN 8. Kepwila Bagian Administrasi Keuangan DPRD 2. Pemyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 3. Penyusunan Dokumen Pergusanan Pergusanan DPRD 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pergusanan Do
Kepsda Bagian Administrasi 1. Penyediaan Gaji dari Tunjangan ASN Kesekretariatan 2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 3. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 4. Koordinasi dan Penyusanan Dokumen Perenganan Perenganan Perenganan Perenganan Dokumen Perenganan Perenganan Penyusanan Dokumen Perpenanan Perenganan Repaian Kinerja dan Penyusanan Dokumen Perenganan Kenangan DPRD 5. Koordinasi dan Penyusanan Laporan Kenangan Akhir Tahun SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kenangan Akhir Tahun SKPD 8. Pengelolaan dan Penyusunan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Rapat Koordinasi dan SkPD 9. Penyediaan Jasa Pengeliharaan Rapat Koordinasi dan Repaiah Kinerja dan Repaiah Kinerja SKPD 11. Penyediaan Jasa Pengeliharaan, Jana Pengeliharaan, Jana Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabahan 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lajoranan Lajoranan Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lajoranan Sarana dan Pasarana Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lajoranan Sarana dan Pasarana Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lajoranan Sarana dan Pasarana Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lajoranan Sarana dan Pasarana Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lajoranan Sarana dan Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lajoranan Sarana dan Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lajoranan Sarana dan Sarana dan Pasarana Sarana dan Pasaranan Sarana Sarana dan Pasarananan Sarana dan Pasaranan Sarana dan Pasaranan Sarana dan Pasarananan Sarana dan Pasaranan Sarana dan Pasaranan Sarana dan Pasarananan Saranan Sarana dan Pasarananan Sarananan Sarananan Saranana
September Sept
Kesokretariatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Penyediaan Gaji dan Dekumen Perengkat Daerah 5. Penyusunan Dokumen Perengkat Daerah 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pernhahan RKA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pernhahan RKA-SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kenangan Akhir Tahun SKPD 8. Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Kenangan Akhir Tahun SKPD 9. Penyediaan Jasa Pemelihuraan Bahan Tanggupan Pemeriksaan 10. Penyediaan Jasa Pemelihuraan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jahahan 11. Penyediaan Jasa Pemelihuraan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jahahan 12. 000,000 12. 000,000
Kesskretariatan 1. Penyediaan Gaji dar Tunjangan ASN Kesskretariatan 2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 3. Resylus Bagian Administrasi Keuangan DPRD 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perahahan RKA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhiisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8. Pengelolaan dan Penyusunan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Pemerikaan 9. Penyediaan Bajat Koordinasi dan Koordinasi dan Penyusunan Pemerikaan 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dinas Jabatan 259,108,400 10. Penyediaan Demonstrasi Keudaraan Perorangan Ditaas atau Kendaraan Dinas Jabatan 259,108,400
Penyediaen Geji dan Tunjangan ASN 3.078.763.296
Samura
Samuristrasi 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.078.763.296 Kesekretariatan 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.078.763.296 Kesekretariatan 3. Penyusunan Dokumen Perengkat Daerah 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.674.300 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Peruhahan RKA-SKPD 5.674.300 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Peruhahan RKA-SKPD 5.674.300 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kenarja dan Bahan Rahan Rahan Tahun SKPD 3.026.800 8. Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.439.100 1.439.100 1.439.100 1.439.10
Separation Sep
Separation Sep
Keysda Baguan Administrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.078.763.296
Kejsala Bagian Administrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Separation Sep
Kepala Bagian Administrasi I. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kesekretariatan 2. Penyediaan Administrasi Keuangan DPRD 3. Penyediaan Administrasi Keuangan DPRD 3. Penyediaan Dokumen Perencaman Perangkat Daengh 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Penyediaan Administrasi Keuangan DPRD 3. Penyediaan Administrasi Keuangan DPRD
Kepada Bagian Administrasi 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kesekretariatan 2. Penyediaan Administrasi Keuangan DPRD 3,078,763,296 16,574,551,571
Kepala Bagian Administrasi 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4 3.078.763.296
Kersela Harrian Administrated 1 December Cont. Acres 4
ACCOMPANIA (A))
JABATAN KEGIATAN YANG DIKENDALIKAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

		Dra. RATNA NINGSIH, M.Si Kabag, Penganggaran dan 1. Fembahasan Pertanggungjawaban APBD NIP. 1968/0427 1993/02 2 00% 2. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2. Pembahasan APBD Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 4. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawah 5. Pembahasan KUA dan PPAS 6. Pembahasan KUA dan PPAS 7. Pengawasan APBD 8. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lapor 9. Pelaksanaan Resea
JUMLAH 1 s/d 3	JUMLAH	1. Penthahasan Pertanggungjawaban APBD 2. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 3. Pembahasan APBD Perubahan 4. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepula Duerah 5. Pembahasan KUA dan PPAS 6. Pembahasan KUA dan PPAS 6. Pembahasan APBD 7. Pengawasan APBD 8. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Ketangan oleh BPK 8. Pengawasan Penggunaan Anggarun 9. Pelaksanaan Reses
31.748.312.067	721,039,300	\$ 21.783.350 18.968.500 29.367.950 21.484.550 18.968.500 22.732.150 2.004.900 10.738.000 574.991.400

Sengkang, 11 Februari 2022

γSEKRETARIS DPRD KAB. WAJO

Drs. SAINAL HAYAT, M.Si Pangkat - Pembian Utama Mnda NIP. 19670101 199603 1 007

31.748.312.067	JUMLAH 1 s/d 3			
721.039.300	JUMLAH			
574,991,400	9. Pelaksanam Reses			
10.738.000	8. Pengawasan Penggunaan Anggarun			
2.004.900	7. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK			
22.732.150	6. Pembahasin APBD			
18.968.500	5. Pembahasan KUA dan PPAS			
21.484.550	4. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawahan Kepala Daerah			
29.367.950	Pembahasan APBD Perubahan			
18.968.500	2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pengawasan	NIP 19680427 199302 2 006	
21.783.350	1. Pembahasan Perlanggungjawabun APBD	Kabag Penganggaran dan	Dra. RATNA NINGSIH, M.Si	24
S	*	3	2	1

Sengkang, 11 Februari 2022

WSEKRETARIS DPRD KAB. WAJO

Drs. SAINAL HAYAT, M.Si Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19670101 99603 1 007